KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

MANAJEMEN ASN Pada MCP 2025

MONITORING CENTER FOR PREVENTION

Direktur Wilayah II Koordinasi Supervisi

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI

PENDIDIKAN

Through Education
(Membangun Nilai)
"Do Not Want to Corrupt"

PENINDAKAN

Through Enforcement (efek jera)
"Dare Not Corrupt"

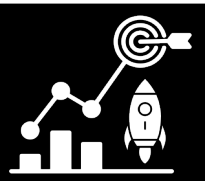

PENCEGAHAN

Through Prevention
(Perbaikan Sistem)
"Can Not Corrupt"

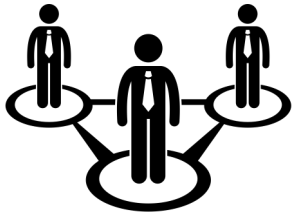

PERAN SERTA MASYARAKAT

KPK menjalankan strategi utama dalam pemberantasan korupsi yang disebut "Trisula Pemberantasan Korupsi" .

Peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

3 ASPEK

- ✓ REGULASI
- ✓ TRANSPARANSI
- ✓ AKUNTABEL

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ASPEK TRANSPARANSI

Indikator : Transparansi Manajemen ASN

No	Keterangan	Dokumen
1	Penggunaan Sistem Integrasi Mutasi (I-MUT) sebagai pengajuan dasar pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan ataupun pemberhentian – 50	Penggunaan Sistem IMUT (untuk Mutasi antar jabatan / internal) - Pertek • Menggunakan I-MUT (100)
2	Dokumen yang menunjukkan hasil seleksi akhir kandidat dan dokumen penetapan Pengangkatan , Pemindahan, dan Pemberhentian – 50 Seleksi Terbuka, sesuai dengan Permenpan RB No 15 Tahun 2019. Apabila Jobfit sesuai dengan regulasi manajemen talenta Permenpan RB No 3 Tahun 2020	1. Dokumen yang menjelaskan proses seleksi terbuka , Manajemen Talenta ataupun JobFit untuk jabatan Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi **(45)** • Pengumuman Pembukaan Seleksi Terbuka, Manajemen Talenta/ Jobfit - 15 • Pengumuman hasil seleksi terbuka,Manajemen talenta , Jobfit (yang menginformasikan proses yang dilakukan) - 15 • Pengumuman hasil akhir Selter, Manajemen Talenta/Jobfit - 15 Jika tidak ada selter, manajemen talenta/jobfit pada tahun 2025 (periode 1 januari- 24 November) cukup surat keterangan PPK yang menyatakan posisi tersebut telah terisi pada tahun sebelumnya (45) 2. Dokumen yang menunjukkan proses penetapan, pengangkatan , pemberhentian ASN pada tahun berjalan (Tahun 2025) – **35** 3. Dokumen yang menunjukkan Surat Keputusan Kepala Daerah / PPK terhadap proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN pada tahun berjalan – **20**

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ASPEK REGULASI

Indikator :Regulasi & Kebijakkan

No	Keterangan	Dokumen
1	Penegakkan Integritas **(50)**	1. Adanya Surat Keputusan Kepala Daerah mengenai Benturan kepentingan (COI) – **50** 2. Pakta Integritas pegawai berisi ; • Benturan dalam kepentingan/ COI (conflict of interest) - **25** • Pemanfaatan barang milik daerah, pelaporan gratifikasi, dan LHKPN (yang termasuk di dalam wajib lapor) - **25**
2	Pengendalian **(50)**	1. **Surat keputusan kepala daerah** mengenai penyesuaian wajib lapor sesuai dengan Perkom KPK No.3 Tahun 2024 (termasuk wajib lapor) – **12,5** 2. Surat Keputusan Daerah tentang Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)-**12,5** 3. Surat Edaran terkait dengan Pengendalian Gratifikasi di seluruh sektor Pemerintah Daerah – **12,5** 4. SOP yang mengatur Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian ASN- **12,5**

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ASPEK AKUNTABILITAS

No	Keterangan	Dokumen
1	Manajemen Kinerja	Bukti penggunaan sistem informasi kinerja ASN pada seluruh perangkat daerah (dibuktikan dari adanya sistem dan isi dari sistem tersebut apakah anatra target kinerja dan hasil kinerja terlihat) – proporsional, max 100 ***pada seluruh OPD**
2	Kepatuhan LHKPN	**Kepatuhan LHKPN – Wajib lapor 2024** 1.Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif -35 2.Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif - 35 3.Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD- 20 **Perluasan LHKPN** Kepatuhan Perluasan Wajib Lapor Kepatuhan Pelaporan LHKPN (Staf khusus atau Ajudan/ memiliki tupoksi sejenis yang mendapatkan kompensasi dari APBD) – 10
3	Budaya Antikorupsi	1. Perencanaan (40) dan pelaksanaan (60) pembangunan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah **-50** 2. Pemberdayaan Penyuluh Anti korupsi dalam pembangunan budaya antikorupsi di pemerintah Daerah (Program / Kegiatan) -**25** ◦ SK Kepala Daerah tentang penetapan Inspektorat sebagai sekretariat PAKSI.-70 ◦ Daftar anggota PAKSI di Pemerintah Daerah minimal 2 - 30 3. Optimalisasi Peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) **- 25** ◦ Bukti tangkap layar laporan **(rapor)** UPG hasil kegiatan monitoring dan evaluasi di pemerintah daerah. Diunduh di website gol.kpk.go.id – **nilai 50** ◦ Gradasi Penilaian Rapor **- 50** ▪ Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai merah – 10 ▪ Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai orange - 30 ▪ Pemerintah daerah yang mendapatkan nilai hijau – 50

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

ASPEK AKUNTABILITAS

No	Keterangan	Dokumen
4	Penegakkan Kode Etik dan Disiplin	1. Pemda Menggunakan I-Dis (Integrated Disiplin) - 50 2. Adanya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi di lingkungan Internal Pemda terkait dengan benturan kepentingan dan penegakkan kode etik (bias menjadi bagian laporan dari pelaksanaan pembangunan budaya antikorupsi) – 50

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Makaseh

Teghemo kasih

Haturnuhun

Mokaseh

Ngatur Nuhun

Berantas Korupsi Sampai Ke Ujung Negeri